



**2025**

# Perubahan RENJA

DINAS PETERNAKAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(PERUBAHAN RENJA – SKPD)  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2025**



---

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
Jalan A. Yani No. 118 Purwodadi-Grobogan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kekuatan dan bimbingan-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan (Perubahan Renja Disnakkan) Tahun 2025 ini dapat disusun.

Penyusunan Perubahan Renja Disnakkan Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, maupun perkembangan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 periode Triwulan I berjalan.

Demikian harapan kami semoga Perubahan Renja Disnakkan Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan untuk Tahun 2025.

Purwodadi, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan  
Kabupaten Grobogan



Amin Nur Hatta, S.Sos.  
Pembina Utama Muda

NIP. 19691223 199003 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	12
2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran	12
2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	26
BAB IV PENUTUP	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan tujuan “Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman Dan Berbudaya”. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan diarahkan pada “Pemantaban daya saing SDM dan penguatan Reformasi birokrasi serta pemajuan nilai-nilai budaya”. Dalam rangka menjalankan prioritas pembangunan secara, efektif dan efisien, maka lini tugas pada Bidang-Bidang serta Sekretariat Dinas Peternakan dan Perikanan perlu untuk ditingkatkan.

Perubahan Renja Disnakkab Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Grobogan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025. Perubahan Renja Disnakkab Tahun 2025 dilaksanakan dengan mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan kondisi dinamika tersebut serta dengan mendasarkan pada hasil capaian kinerja pembangunan daerah urusan Kelautan dan Perikanan dan urusan Pertanian sampai dengan triwulan I tahun 2025, maka perlu dilakukan percepatan upaya yang lebih optimal agar hasil di akhir tahun dapat tercapai. Penataan kembali kebijakan perencanaan dan penganggaran, termasuk efisiensi belanja berdasarkan Instrk perlu segera dilaksanakan agar dapat lebih optimal dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah urusan Kelautan dan Perikanan dan urusan Pertanian tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja Disnakkam Tahun 2025 kemudian dijadikan dasar dan pedoman untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Disnakkam Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali, terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3604 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
31. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Disnakan Tahun 2025 adalah melakukan penyesuaian terhadap target kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 dengan mempertimbangkan adanya kebijakan efisiensi anggaran dan hasil kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 serta menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan di tahun 2025 dan mewujudkan

keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan pertanian dan perikanan di Kabupaten Grobogan.

Perubahan Renja Disnakkam Tahun 2025 memuat Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai Tugas pokok fungsi OPD, serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Disamping itu Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021 – 2026.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Disnakkam Tahun 2025 adalah :

- a. Menyesuaikan rencana kerja dengan perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, memastikan pencapaian indikator kinerja, dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah diubah;
- b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun berjalan;
- c. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
- d. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang peternakan, pertanian, dan perikanan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Disnakkam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025  
Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan tribulan I tahun 2025, analisis Kinerja Pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tantangan dan hambatan OPD.
- BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
Bab ini berisi Antara lain mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan;
- BAB IV : PENUTUP

**BAB II**

**EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN GROBOGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

**2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran**

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan dengan tujuan menganalisis hasil capaian kinerja dengan mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan) terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan pencapaian Renstra.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam Renstra 2021-2026 memiliki 2 Tujuan dan 2 Sasaran yang masing-masing dalam pencapaian tujuan/sasarannya didukung dengan program-program berikut ini :

- a. Tujuan I Meningkatkan populasi ternak unggulan dengan Sasaran Meningkatnya populasi ternak unggulan, dalam pelaksanaannya didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian.
- b. Tujuan II Meningkatkan produksi perikanan dengan Sasaran Meningkatnya produksi perikanan, dalam pelaksanaannya didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

**Tabel 2.1**  
**Analisis Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

No	Indikator	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Populasi ternak unggulan	AU	227.636	232.189,00	236.833,00	236.833	246.401,00	251.359,00	227.636	243.343,98	245.801	249.471,89	246.401,00	
	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase produksi bibit ternak	%	38	40	42	44	46	48	38	59,71	72,05	72	46	
	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase angka kesembuhan hewan	%	73	74	75	75	76	76	73	92,60	92,70	75	76	
	Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%	55,50	56,00	56,50	57,00	57,50	58,00	55,5	92,39	98,57	100	57,50	
	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase kelompok tani ternak terbina	%	55	60	65	70	75	80	55	59,16	81,00	53,47	75	

No	Indikator	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.	Produksi Perikanan	Ton	3.789,28	3.992,17	4.206,50	4.432,50	4.671,10	4.992,00	3.795,707	3.995,87	4.211,59	4.433,95	4.671,10	
	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	1.201,62	1.262,00	1.325,50	1.392,30	1.462,60	1.536,45	1201,62	1.264,68	1.329,56	1.392,40	1.462,60	
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	2.587,66	2.730,17	2.881,00	3.040,20	3.208,50	3.386,12	2587,66	2.731,19	2.882,02	3.041,55	3.208,50	
	Jumlah produksi produk olahan ikan	Ton	298,88	304,26	310,04	316,24	322,57	322,57	298,88	307,32	313,48	322,56	322,57	
3.	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dilihat pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan terdapat 2 (dua) sasaran dengan jumlah indikator sebanyak 2 indikator. Capaian kinerja pada kedua indikator menunjukkan kinerja sangat tinggi, sasaran pertama meningkatnya pertumbuhan populasi ternak target sebesar 236.833 AU dengan capaian sebesar 249.471,89 AU atau tercapai kinerja sebesar 102,71 %, sedangkan sasaran kedua meningkatnya produksi perikanan memiliki target sebesar 4.432,5 Ton tercapai sebesar 4.433,95 Ton atau capaian kinerjanya sebesar 100,03 %.

Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja pada tujuan I (meningkatkan pertumbuhan populasi ternak) menunjukkan tren positif dimana pada tahun 2023 tercapai sebesar 48,5% sedangkan pada tahun 2024 menurun hanya tercapai sebesar 74,5%. Sedangkan capaian kinerja sasaran I (meningkatnya Populasi peternakan) pada tahun 2024 sebesar 103,27% atau lebih rendah dari capaian tahun 2023 sebesar 103,78%.
- 2) Capaian kinerja tujuan II (Meningkatkan produksi perikanan) pada tahun 2024 sebesar 98,32%, atau turun dari capaian tahun 2023 yaitu sebesar 100,56%. Demikian juga capaian kinerja sasaran II (Meningkatnya produksi perikanan) pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar 100,03%, sedikit lebih rendah dari tahun 2023 yang tercapai sebesar 100,12%.
- 3) Capaian kinerja tujuan III (Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas) tetap bisa dipertahankan dimana baik pada tahun 2024 maupun 2023 tercapai sebesar 100%. Demikian juga pada capaian kinerja sasaran III (Meningkatnya kinerja tata Kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik) pada tahun 2024 dan 2023 tercapai sebesar 100%.

Secara umum pencapaian realisasi kinerja pembangunan sektor peternakan dan perikanan tersebut sangat baik berkat terlaksananya kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan peternakan dan perikanan pada tahun 2024. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : (1) mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk peternakan dan

perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing tinggi; (2) Mengembangkan diversifikasi usaha pengolahan produk peternakan dan perikanan serta strategi pemasaran; (3) Optimalisasi penggunaan teknologi dan sumber daya peternakan dan perikanan; (4) Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan penyakit hewan menular strategis; (5) Penguatan kelembagaan petani; (6) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan; (7) Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas peternakan dan perikanan; (8) Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Dinas peternakan dan perikanan.

## **2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan**

Evaluasi Renja-PD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dilaksanakan dengan dengan berpedoman pada Perubahan Renstra-PD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Secara rinci hasil evaluasi Renja-PD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 2.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s/d Triwulan I Tahun 2025  
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target per Triwulan										Realisasi per Triwulan								Penanggung-jawab	Keterangan			
				TW I		TW II		TW III		TW IV		Jumlah		TW I		TW II		TW III		TW IV				Jumlah		
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran	
	Meningkatkan pertumbuhan populasi ternak	Pertumbuhan Populasi ternak unggulan		0,5%	4.321.147.295	0,5%	8.520.244.709	0,5%	7.024.950.999	0,5%	2.628.870.997	2%	22.495.214.000	0,5%	1.849.254.972							0,5%	1.849.254.972	Kepala Dinas		
1.	Meningkatnya Populasi peternakan	Populasi ternak unggulan	Pertumbuhan Populasi ternak unggulan		4.321.147.295		8.520.244.709		7.024.950.999		2.628.870.997		22.495.214.000		1.849.254.972								1.849.254.972	Kepala Dinas		
			a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	25%	177.412.000	25%	1.738.845.000	25%	4.082.505.000	0	4.350.000	100%	6.003.112.000	25%	53.958.500							25%	53.958.500	Eselon III	
				Persentase produksi bibit ternak																						
			1). Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keberhasilan inseminasi buatan	75%	4.350.000	75%	4.350.000	75%	29.350.000	75%	4.350.000	75%	42.400.000	75%	3.960.000							75%	3.960.000	Eselon III	
			a). SubKegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil	3 Laporan	4.350.000	3 Laporan	4.350.000	3 Laporan	29.350.000	3 Laporan	4.350.000	12 Laporan	42.400.000	3 Laporan	3.960.000							12 Laporan	3.960.000	Eselon IV/Subkor	
			2). Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peternak terbina	15%	28.562.000	0	0	0	0	0	0	15%	28.562.000	15%	0							15%	0	Eselon III	
			a). SubKegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	3 Laporan	28.562.000	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	12 Laporan	28.562.000	3 Laporan	0							12 Laporan	0	Eselon IV/Subkor	Adanya kebijakan efisiensi anggaran
			3). Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kelompok tani ternak penerima bantuan	15%	144.500.000	15%	1.734.495.000	15%	4.053.155.000	15%	0	15%	5.932.150.000	15%	49.998.500							15%	49.998.500	Eselon III	
			a). Subkegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0	0	247 ekor	1.734.495.000	437 ekor	4.053.155.000	0	0	684 ekor	5.787.650.000	0	0							684 ekor	0	Eselon IV/Subkor	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target per Triwulan										Realisasi per Triwulan										Penanggung-jawab	Keterangan
				TW I		TW II		TW III		TW IV		Jumlah		TW I		TW II		TW III		TW IV		Jumlah			
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
			b). Subkegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	10 Ton	144.500.000	0	0	0	0	0	0	10 Ton	144.500.000	5 Ton	49.998.500					10 Ton	49.998.500	Eselon IV/Subkor		
			b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	25%	74.459.000	25%	2.814.866.000	25%	47.175.000	25%	0	100%	2.936.500.000	25%	0						100%	0	Eselon III	
			1). Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian	0	74.459.000	13 Unit	2.814.866.000	0	47.175.000	0	0	13 Unit	2.936.500.000	0	0						13 Unit	0	Eselon III	
			a). Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	Eselon IV/Subkor	
			b). Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang tersedia	0	74.459.000	13 Unit	2.814.866.000	0	47.175.000	0	0	13 Unit	2.936.500.000	0	0						13 Unit	0	Eselon IV/Subkor	Adanya KMK No 29 tahun 2025 yang membatalkan pelaksanaan DAK Fisik 2025 bidang KPPN
			c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kesembuhan hewan	85%	820.815.000	85%	456.978.000	85%	516.395.000	85%	255.425.000	85%	2.049.613.000	85%	72.633.000						85%	72.633.000	Eselon III	
				Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH																					
			1). Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali	85%	46.724.000	85%	153.273.000	85%	0	85%	0	85%	199.997.000	85%	0						85%	0	Eselon III	
			a). Subkegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	3 Laporan	46.724.000	3 Laporan	153.273.000	3 Laporan	0	3 Laporan	0	12 Laporan	199.997.000	3 Laporan	0						12 Laporan	0	Eselon IV/Subkor	Pelaksanaan terkendala SHS yang belum sesuai
			2). Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan Jasa Medik Veteriner	19,3%	762.750.000	19,3%	249.750.000	19,3%	487.350.000	19,3%	249.750.000	19,3%	1.749.600.000	19,3%	64.125.000						19,3%	64.125.000	Eselon III	
			a). Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah dan jenis obat hewan serta bahan medis habis pakai tersedia	3 Laporan	762.750.000	3 Laporan	249.750.000	3 Laporan	487.350.000	3 Laporan	249.750.000	12 Laporan	1.749.600.000	3 Laporan	64.125.000						12 Laporan	64.125.000	Eselon IV/Subkor	Pengadaan terkendala aplikasi e katalog V6 yang belum bisa diakses

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target per Triwulan										Realisasi per Triwulan										Penanggung-jawab	Keterangan
				TW I		TW II		TW III		TW IV		Jumlah		TW I		TW II		TW III		TW IV		Jumlah			
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
			3). Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	58%	11.341.000	58%	53.955.000	58%	29.045.000	58%	5.675.000	58%	100.016.000	58%	8.508.000					58%	8.508.000	Eselon III		
		a). Subkegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	3 Laporan	0	3 Laporan	53.955.000	3 Laporan	29.045.000	3 Laporan	0	12 Laporan	83.000.000	3 Laporan	0					12 Laporan	0		Eselon IV/Subkor		
		b). Subkegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	3 Laporan	11.341.000	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	5.675.000	12 Laporan	17.016.000	3 Laporan	8.508.000					12 Laporan	8.508.000		Eselon IV/Subkor		
		d. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak terbiasa		17.522.000		112.900.000		25.588.000		0		156.010.000		5.720.000						5.720.000		Eselon III		
		1). Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak terbiasa		75%	17.522.000	75%	112.900.000	75%	25.588.000	75%	0	75%	156.010.000	75%	5.720.000					75%	5.720.000		Eselon III	
		a). Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan	30 Unit	17.522.000	150 Unit	112.900.000	25 Unit	25.588.000	0	0	205 Unit	156.010.000	30 Unit	5.720.000					205 Unit	5.720.000		Eselon IV/Subkor	Pelaksanaan menunggu penyesuaian efisiensi anggaran	
		b). Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		Eselon IV/Subkor		
		e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat, anggaran, dan evaluasi kinerja berkualitas		25%	3.230.939.295	25%	3.396.655.709	25%	2.353.287.999	25%	2.369.095.997	100%	11.349.979.000	25%	1.716.943.472					100%	1.716.943.472		Eselon III	
		1). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat, anggaran, dan evaluasi kinerja berkualitas		25%	22.950.000	25%	54.960.000	25%	3.000.000	25%	2.000.000	100%	82.910.000	25%	21.530.000					100%	21.530.000		Eselon III	
		a). Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	22.950.000	0	54.960.000	1	3.000.000	1	2.000.000	2	82.910.000	0	21.530.000					0	21.530.000		Eselon IV/Subkor	
		2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN, dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		25%	2.163.979.998	25%	2.348.302.808	25%	1.864.240.098	25%	1.871.088.096	100%	8.247.611.000	25%	1.298.532.029					100%	1.298.532.029		Eselon III	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target per Triwulan										Realisasi per Triwulan										Penanggung-jawab	Keterangan	
				TW I		TW II		TW III		TW IV		Jumlah		TW I		TW II		TW III		TW IV		Jumlah				
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
			a). Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	2.163.979.998	69	2.348.302.808	69	1.864.240.098	69	1.871.088.096	69	8.247.611.000	69	1.298.532.029							69	1.298.532.029	Eselon IV/Subkor	TPP belum bisa dibayarkan pada triwulan I Tahun 2025
			b). Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eselon IV/Subkor	
			<b>3). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	25%	133.660.000	25%	300.810.000	25%	0	25%	0	100%	434.470.000	25%	0							100%	0	Eselon III	
			a). Subkegiatan Pengadaan Pakiahan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiahan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	133.660.000	0	0	0	0	0	0	3 Paket	133.660.000	3 Paket	0							3 Paket	0	Eselon IV/Subkor	Pelaksanaan menunggu penyelesaian efisiensi anggaran
			b). Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	50 Orang	300.810.000	0	0	0	0	50 Orang	300.810.000	0	0							50 Orang	0	Eselon IV/Subkor	
			<b>4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu</b>	25%	520.589.500	25%	262.271.000	25%	203.811.000	25%	203.811.000	100%	1.190.482.500	25%	134.028.088							100%	134.028.088	Eselon III	
			a). Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	81.112.000	0	0	0	0	0	0	1 Paket	81.112.000	1 Paket	0							1 Paket	0	Eselon IV/Subkor	Pengadaan terkendala aplikasi e katalog VG yang belum bisa diakses
			b). Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	69.975.000	3 Paket	69.795.000	3 Paket	69.795.000	3 Paket	69.795.000	12 Paket	279.360.000	3 Paket	35.625.600							12 Paket	35.625.600	Eselon IV/Subkor	
			c). Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	54.371.000	0	78.740.000	0	20.280.000	0	20.280.000	1 Paket	173.671.000	1 Paket	17.137.200							1 Paket	17.137.200	Eselon IV/Subkor	
			d). Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar tersedia	3 Dokumen	3.300.000	3 Dokumen	3.300.000	3 Dokumen	3.300.000	3 Dokumen	3.300.000	12 Dokumen	13.200.000	3 Dokumen	4.310.000							12 Dokumen	4.310.000	Eselon IV/Subkor	
			e). Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	201.392.500	0	0	0	0	0	0	1 Paket	201.392.500	1 Paket	1.000.000							1 Paket	1.000.000	Eselon IV/Subkor	Pengadaan terkendala aplikasi e katalog VG yang belum bisa diakses
			f). Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	110.439.000	3 Laporan	110.436.000	3 Laporan	110.436.000	3 Laporan	110.436.000	12 Laporan	441.747.000	3 Laporan	75.955.288							12 Laporan	75.955.288	Eselon IV/Subkor	



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target per Triwulan										Realisasi per Triwulan										Penanggung-jawab	Keterangan
				TW I		TW II		TW III		TW IV		Jumlah		TW I		TW II		TW III		TW IV		Jumlah			
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
			1). Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Cakupan bina kelompok tani nelayan	20%	89.997.000	20%	0	20%	0	20%	0	20%	89.997.000	20%	0					20%	0	Eselon III		
			a). Subkegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	4 Unit	89.997.000	0	0	0	0	0	0	4 Unit	89.997.000	4 Unit	0					4 Unit	0	Eselon IV/Subko	Terjadi bencana banjir pada bulan Februari sehingga pelaksanaan penebaran mundur	
			b). Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	Eselon IV/Subkor		
			<b>b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	Jumlah produksi perikanan budidaya	802,125 Ton	82.850.000	802,125 Ton	33.230.000	802,125 Ton	12.170.000	802,125 Ton	11.750.000	3.208,5 Ton	140.000.000	802,125 Ton	13.850.000					3.208,5 Ton	13.850.000	Eselon III		
			1). Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan air tawar yang terbina	2,9%	15.000.000	2,9%	0	2,9%	0	2,9%	0	2,9%	15.000.000	2,9%	0					2,9%	0	Eselon III		
			a). Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	8 Unit	15.000.000	0	0	0	0	0	0	8 Unit	15.000.000	8 Unit	0					8 Unit	0	Eselon IV/Subkor		
			2). Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan memperoleh sarana produksi perikanan	4 Kelompok	67.850.000	4 Kelompok	33.230.000	4 Kelompok	12.170.000	4 Kelompok	11.750.000	4 Kelompok	125.000.000	4 Kelompok	13.850.000					4 Kelompok	13.850.000	Eselon III		
			a). Subkegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2 Pokdakan	54.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	2 Pokdakan	55.000.000	2 Pokdakan	0					2 Pokdakan	0	Eselon IV/Subkor		
			b). Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2 Unit	13.850.000	2 Unit	32.230.000	2 Unit	12.170.000	2 Unit	11.750.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	13.850.000					2 Unit	13.850.000	Eselon IV/Subkor		
			<b>c. Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan</b>	Jumlah produksi produk olahan ikan	80,6425 Ton	43.955.000	80,6425 Ton	130.645.000	80,6425 Ton	400.000	80,6425 Ton	0	322,57 Ton	175.000.000	80,6425 Ton	0					322,57 Ton	0	Eselon III		
			1). Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha pengolahan ikan yang terbina	20%	43.955.000	20%	130.645.000	20%	400.000	20%	0	20%	175.000.000	20%	0					20%	0	Eselon III		

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target per Triwulan										Realisasi per Triwulan										Penanggung-jawab	Keterangan
				TW I		TW II		TW III		TW IV		Jumlah		TW I		TW II		TW III		TW IV		Jumlah			
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
			a). Subkegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0,255	43.955.000	0,255	45.645.000	0	400.000	0	0	0,510 Ton	90.000.000	0,255	0					0,510 Ton	0	Eselon IV/Subko	Pengadaan terkendala karena e katalog V6 belum bisa diakses	
			b). Subkegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	0	0	37 Pelaku Usaha	85.000.000	0	0	0	0	37 Pelaku Usaha	85.000.000	0	0					37 Pelaku Usaha	0	Eselon IV/Subkor		
Total					4.537.949.295		8.684.119.709		7.037.520.999		2.640.620.997		22.900.211.000		1.863.104.972		0			0		1.863.104.972			

Secara umum pelaksanaan renja tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini terjadi karena terbitnya Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan sehingga terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan untuk mengakomodir efisiensi anggaran dalam OPD.

Secara rinci hasil evaluasi pada Tabel 2.2 di atas dapat diuraikan hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Disnakkam Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, kegiatan dalam program ini berupa kegiatan Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum yang direncanakan berjalan di triwulan I tahun 2025 (bulan Februari), akan tetapi harus ditunda karena terjadi bencana banjir di beberapa kecamatan yang mengakibatkan meluapnya sungai-sungai dan perairan umum lainnya sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakan kegiatan penebaran benih ikan. Kegiatan dijadwalkan ulang pada bulan April 2025.
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdapat 2 kegiatan dan 3 subkegiatan dalam program ini dan berjalan sesuai dengan jadwal.
- 3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdapat 1 kegiatan dan 2 subkegiatan dimana sampai dengan triwulan I belum dapat dilaksanakan dikarenakan aplikasi E-katalog Versi 6 belum bisa digunakan untuk pengadaan barang/jasa.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, terdapat sebanyak 7 kegiatan dan 17 subkegiatan dimana sebagian besar telah berjalan sesuai target dan jadwal. Beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dikarenakan terkena efisiensi (perjalanan dinas, atk, makan dan minum, cetak, dan perjalanan dinas)
- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdapat 3 kegiatan dan 4 subkegiatan yang berjalan sesuai dengan rencana target dan anggaran.
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Terdapat 1 kegiatan dan 1 subkegiatan yang hampir 90% pagu anggaran masuk dalam efisiensi (sumber dana DAK Fisik 2025) sehingga pelaksanaan pekerjaan mengalami penjadwalan ulang.

- 7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdapat 3 kegiatan dan 4 subkegiatan dimana 1 subkegiatan (Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan) telah sesuai dengan rencana target kinerja dan anggaran, sedang 3 subkegiatan lainnya mundur dari target yang ditentukan karena penyesuaian juknis kegiatan operasional puskswan (sumber dana DAK Non Fisik) dan penyesuaian SHS barang.
- 8) Program Penyuluhan Pertanian terdapat 1 kegiatan dan 1 subkegiatan dengan pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang ditargetkan.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN GROBOGAN**

Perubahan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada Tahun 2025 dilakukan karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan rencana yang telah dibuat dengan dinamika yang terjadi di lapangan, seperti perubahan prioritas pembangunan, kerangka ekonomi, atau kondisi keuangan daerah. Tujuan perubahan Rencana Kerja adalah memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai sasaran pembangunan..

Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali, terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3604 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta pendanaan indikatifnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan**  
**Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**  
**Tahun 2025**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8				
	Dinas Peternakan dan Perikanan				22.900.211.000	23.655.939.800	755.728.800				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				22.900.211.000	23.655.939.800	755.728.800				
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			404.997.000	699.997.000	295.000.000				
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.462,6 Ton	1.462,6 Ton	89.997.000	89.997.000	0		
3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Cakupan bina kelompok tani nelayan	20 %	20 %	89.997.000	89.997.000	0	
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	0	0	0
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4 Unit	4 Unit	89.997.000	89.997.000	0
					Penebaran benih ikan diperairan umum			89.997.000	89.997.000	0	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	3208,5 ton	3208,5 ton	140.000.000	335.000.000	195.000.000		
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya Ikan air tawar yang terbina	3,3 %	3,3 %	15.000.000	165.000.000	150.000.000	

3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	8 Kelompok	9 Kelompok	15.000.000	165.000.000	150.000.000
					Pembinaan Pokdakan				15.000.000	15.000.000	0
					Pembangunan Kolam Ikan Kelompok Tani Ikan Cempleng Desa Putat Kec. Purwodadi				0	150.000.000	150.000.000
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan (Pokdakan) yang menerima sarana produksi perikanan	4 kelompok	6 kelompok	125.000.000	170.000.000	45.000.000
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	4 Unit	55.000.000	100.000.000	45.000.000
					Bantuan benih ikan dan pakan Pokdakan Sumber Rejeki Desa Kalanglundo Kec. Ngaringan				35.000.000	35.000.000	0
					Bantuan benih ikan dan pakan Pokdakan Sido dadi Desa Jambon Kecamatan Pulokulon				20.000.000	20.000.000	0
					Bantuan Peralatan Kelompok Pembudidaya Ikan Unggul Jaya Desa Ngambakrejo Kec. Tanggungharjo				0	10.000.000	10.000.000
					Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Kelompok Sendang Tirta Lestari Dusun Krajan RT 01 RW 02 Desa Sumberjatipohon Kec. Grobogan				0	35.000.000	35.000.000
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	70.000.000	70.000.000	0

					Pengadaan indukan ikan BBI Kab. Grobogan				20.500.000	20.500.000	0
					Pengadaan pakan dan sarana budidaya ikan BBI Kab. Grobogan				49.500.000	49.500.000	0
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi produk olahan ikan	322,57 ton	322,57 ton	175.000.000	275.000.000	100.000.000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi produk olahan ikan	316.24 ton	316.24 ton	175.000.000	275.000.000	100.000.000
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,51 Ton	0,51 Ton	90.000.000	90.000.000	0
					Penyelenggaraan Sosialisasi Gemarikan				70.000.000	70.000.000	0
					Penyelenggaraan Lomba Masak Serba Ikan				20.000.000	20.000.000	0
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	37 Pelaku Usaha	47 Pelaku Usaha	85.000.000	185.000.000	100.000.000
					Studi Lapang Kelompok Usaha Garam Rakyat				85.000.000	85.000.000	0
					Bantuan Pengembangan usaha Kelompok Usaha Garam Rakyat				0	100.000.000	100.000.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				22.495.214.000	22.955.942.800	460.728.800
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	100 %	11.349.979.000	10.756.808.800	-593.170.200

3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat, penganggaran, dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	100 %	82.910.000	83.010.000	100.000
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	82.910.000	83.010.000	100.000
					Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Disnakkam				52.000.000	52.000.000	0
					Updating Data Website dan Medsos Dinas				11.000.000	12.000.000	1.000.000
					Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah				19.910.000	19.010.000	-900.000
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	0	0	0
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	-	100 %	8.247.611.000	8.060.947.000	-186.664.000
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	72 Orang/bulan	8.247.611.000	8.047.387.000	-200.224.000
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.247.611.000	8.047.387.000	-200.224.000
3	27	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	0	13.560.000	13.560.000
					Penyediaan Honorarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pengelola Barang				0	13.560.000	13.560.000

3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	100 %	434.470.000	87.460.000	-347.010.000
3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	2 Paket	133.660.000	87.460.000	-46.200.000
					Pengadaan seragam hitam putih, batik seragam dan kaos olahraga				133.660.000	0	-133.660.000
					Pengadaan batik seragam dan kaos olahraga				0	87.460.000	87.460.000
3	27	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	300.810.000	0	-300.810.000
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				300.810.000	0	-300.810.000
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %	1.190.482.500	1.042.654.300	-147.828.200
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	81.112.000	81.112.000	0
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				81.112.000	81.112.000	0
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	279.360.000	225.350.000	-54.010.000
					Penyediaan makanan dan minuman rapat				212.280.000	166.500.000	-45.780.000
					Penyediaan makanan dan minuman aktifitas lapangan				67.080.000	58.850.000	-8.230.000
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	173.671.000	166.563.800	-7.107.200

					Cetak Spanduk Idul Adha, Penyediaan Cetak MMT dan Backdrop				47.260.000	47.260.000	0
					Penyediaan jasa fotocopy				86.422.000	79.314.800	-7.107.200
					Cetak karcis retribusi, kwitansi A2, dan tanda terima PAD				39.989.000	39.989.000	0
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000	13.200.000	0
					Langganan Surat Kabar				4.200.000	4.200.000	0
					Penyediaan jasa pemuatan iklan di surat kabar				9.000.000	9.000.000	0
3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	201.392.500	180.912.500	-20.480.000
					Pengadaan alat tulis kantor selama 1 tahun				201.392.500	180.912.500	-20.480.000
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	441.747.000	375.516.000	-66.231.000
					Perjalanan dinas biasa				237.747.000	227.666.000	-10.081.000
					Perjalanan dinas dalam kota				204.000.000	147.850.000	-56.150.000
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %	100 %	0	57.454.000	57.454.000
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	7 Unit	0	57.454.000	57.454.000
					Pengadaan alat komunikasi tablet dan printer				0	57.454.000	57.454.000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	858.316.500	851.836.500	-6.480.000

3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	0
					Penyediaan benda pos (materai)				10.000.000	10.000.000	0
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	197.337.500	197.337.500	0
					Penyediaan jasa telepon				25.000.000	20.000.000	-5.000.000
					Penyediaan jasa air				25.200.000	12.800.000	-12.400.000
					Penyediaan jasa listrik				147.137.500	164.537.500	17.400.000
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	650.979.000	644.499.000	-6.480.000
					Pengadaan alat kebersihan				89.449.000	89.449.000	0
					Penyediaan honorarium THL				561.530.000	555.050.000	-6.480.000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	254 unit	290 unit	536.189.000	573.447.000	37.258.000
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	92 Unit	237.192.000	275.272.000	38.080.000
					Penyediaan BBM pemeliharaan kendaraan dinas				72.000.000	100.080.000	28.080.000
					Jasa KIR				16.102.000	26.102.000	10.000.000
					Pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan				149.090.000	149.090.000	0
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit	205 Unit	150.922.000	150.100.000	-822.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (AC, Kalibrasi, CCTV, Lemari Es, dan OHP)				64.142.000	63.320.000	-822.000

					Pemeliharaan PC/Laptop dan Printer				79.280.000	79.280.000	0
					Pemeliharaan jaringan internet				7.500.000	7.500.000	0
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	148.075.000	148.075.000	0
					Pemeliharaan gedung kantor Disnakkam (12 unit)				148.075.000	148.075.000	0
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemanfaatan sarana peternakan Persentase produksi bibit ternak	45 100 % %	100 45 % %	6.003.112.000	7.088.260.000	1.085.148.000
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keberhasilan inseminasi buatan	75 %	75 %	42.400.000	31.870.000	-10.530.000
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	12 Laporan	42.400.000	31.870.000	-10.530.000
					Pembinaan Inseminator				17.400.000	17.400.000	0
					Lomba Inseminator				25.000.000	14.470.000	-10.530.000
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peternak terbina	15 %	15 %	28.562.000	45.862.000	17.300.000
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	12 Laporan	28.562.000	45.862.000	17.300.000
					Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring Kelompok Perbibitan Ternak (Penerima Hibah 2025)				28.562.000	28.562.000	0

					Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring Kelompok Perbibitan Ternak (Penerima Hibah Perubahan 2025)				0	17.300.000	17.300.000
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kelompok tani ternak penerima bantuan	22 %	22 %	5.932.150.000	7.010.528.000	1.078.378.000
3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	10 Ton	10 Ton	144.500.000	144.500.000	0
					Pengadaan hijauan pakan ternak dan konsentrat (bantuan ke 10 KTT)				144.500.000	144.500.000	0
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	684 Ekor	1175 Ekor	5.787.650.000	6.866.028.000	1.078.378.000
					Pengadaan Barang dan Jasa				6.000.000	13.300.000	7.300.000
					Pengadaan Kambing Jawarandu Jantan (untuk 16 KTT)				789.900.000	789.900.000	0
					Kelompok Tani Ternak Berkah Tani Desa Terkesi Kecamatan Klambu				28.705.000	28.705.000	0
					Kelompok Tani Ternak Cah Angon Ds. Kronggen Kec. Brati				28.705.000	28.705.000	0
					Kelompok Tani Ternak Cempe Makmur Desa Genengadal Kecamatan Toroh				14.865.000	14.865.000	0
					Kelompok Tani Ternak Gading Makmur Desa Karanganyar Kecamatan Geyer				48.081.000	48.081.000	0
					Kelompok Tani Ternak Jaya Abadi Ds. Putat Kec. Purwodadi				14.865.000	14.865.000	0
					Kelompok Tani Ternak Joyo Katong Ds. Katong Kec. Toroh				143.525.000	143.525.000	0

					Kelompok Tani Ternak Mudi Makmur Ds. Mlilir Kec. Gubug				20.401.000	20.401.000	0
					Kelompok Tani Ternak Ngudi Makmur Ds. Bandungharjo Kec. Toroh				143.525.000	143.525.000	0
					Kelompok Tani Ternak Pitaloka Farm Ds. Tlogotirto Kec. Gabus				28.705.000	28.705.000	0
					Kelompok Tani Ternak Poncol Farm Kel. Kuripan Kec. Purwodadi				14.865.000	14.865.000	0
					Kelompok Tani Ternak Rejo Makmur Ds. Ketro Kec. Karangrayung				96.162.000	96.162.000	0
					Kelompok Tani Ternak Rojo Koyo Ds. Dempel Kec. Karangrayung				28.705.000	28.705.000	0
					Kelompok Tani Ternak Rojo Koyo Makmur Ds. Kandangrejo Kec. Klambu				28.705.000	28.705.000	0
					Kelompok Tani Ternak Sumber Makmur Kel. Kuripan Kec. Purwodadi				20.401.000	20.401.000	0
					Kelompok Tani Ternak Sumber Rejeki Ds. Ledokdawan Kec. Geyer				14.865.000	14.865.000	0
					Kelompok Tani Ternak Unggul Mulya Ds. Telawah Kec. Karangrayung				114.820.000	114.820.000	0
					Pengadaan Sapi Peranakan/Persilangan Ongole (untuk 21 KTT)				2.593.250.000	2.593.250.000	0
					Kelompok Tani Ternak Bebel Sari Ds. Kebonagung Kec. Tegowanu				191.675.000	191.675.000	0
					Kelompok Tani Ternak Boeh Rejo Ds. Tlogorejo Kec. Tegowanu				191.675.000	191.675.000	0
					Kelompok Tani Ternak Grajegan Makmur Ds. Sukorejo Kec. Tegowanu				169.125.000	169.125.000	0
					Kelompok Tani Ternak Bakti Mulyo Ds. Pengkol Kec. Penawangan				101.475.000	101.475.000	0

					Kelompok Tani Ternak Bebelan Agung Ds. Kebonagung Kec. Tegowanu				191.675.000	191.675.000	0
					Kelompok Tani Ternak Berkah Agronova Gemilang Ds. Latak Kec. Godong				112.750.000	112.750.000	0
					Kelompok Tani Ternak Berkah Rizki Ds. Menawan Kec. Klambu				124.025.000	124.025.000	0
					Kelompok Tani Ternak Berkah Ternak Ds. Terkesi Kec. Klambu				112.750.000	112.750.000	0
					Kelompok Tani Ternak Bibit Kawit Ds. Kronggen Kec. Brati				112.750.000	112.750.000	0
					Kelompok Tani Ternak Fatkhul Jannah Ds. Karanglangu Kec. Kedungjati				90.200.000	90.200.000	0
					Kelompok Tani Ternak Jagan Indah Ds. Taruman Kec. Klambu				124.025.000	124.025.000	0
					Kelompok Tani Ternak Lembu Makmur Ds. Taruman Kec. Klambu				124.025.000	124.025.000	0
					Kelompok Tani Ternak Polaman Jaya Ds. Jatipecaron Kec. Gubug				45.100.000	45.100.000	0
					Kelompok Tani Ternak Punto Dewo Ds. Bendoharjo Kec. Gabus				101.475.000	101.475.000	0
					Kelompok Tani Ternak Saroni Mulyo Ds. Dempel Kec. Karangrayung Rp.				112.750.000	112.750.000	0
					Kelompok Tani Ternak Sarwo Makmur Ds. Gubug Kec. Gubug				90.200.000	90.200.000	0
					Kelompok Tani Ternak Sido Makmur Ds. Sugihmanik Kec. Tanggungharjo				90.200.000	90.200.000	0
					Kelompok Tani Ternak Sido Mukti Ds. Menawan Kec. Klambu				124.025.000	124.025.000	0

					Kelompok Tani Ternak Sido Mulyo Ds. Bendoharjo Kec. Gabus				101.475.000	101.475.000	0
					Kelompok Tani Ternak Sinar Grup Ds. Menduran Kec. Brati				90.200.000	90.200.000	0
					Kelompok Tani Ternak Tempel Sari Ds. Tlogorejo Kec. Tegowanu				191.675.000	191.675.000	0
					Pengadaan Sapi Peranakan/Persilangan Limousine (untuk 19 KTT)				2.398.500.000	2.398.500.000	0
					Kelompok Tani Ternak Argo Jati Ds. Dimoro Kec. Toroh				146.575.000	146.575.000	0
					Kelompok Tani Ternak Arjuna Ds. Rambat Kec. Geyer				146.575.000	146.575.000	0
					Kelompok Tani Ternak Bangkit Ds. Pendem Kec. Ngaringan				146.575.000	146.575.000	0
					Kelompok Tani Ternak Berkah Ds. Karangasem Kec. Wirosari				266.500.000	266.500.000	0
					Kelompok Tani Ternak Berkah Lembu Ds. Kronggen Kec. Brati				93.275.000	93.275.000	0
					Kelompok Tani Ternak Berkah Makmur Ds. Tanggunharjo Kec. Grobogan				106.600.000	106.600.000	0
					Kelompok Tani Ternak Berkah Mulia Ds. Godong Kec. Godong				133.250.000	133.250.000	0
					Kelompok Tani Ternak Berkah Sapi Ds. Teguhan Kec. Grobogan				119.925.000	119.925.000	0
					Kelompok Tani Ternak Jaya Kusuma Ds. Geyer Kec. Geyer				93.275.000	93.275.000	0
					Kelompok Tani Ternak Karya Rahayu Ds. Boloh Kec. Toroh				66.625.000	66.625.000	0
					Kelompok Tani Ternak Lembu Karya Abadi Ds. Rejosari Kec. Grobogan				119.925.000	119.925.000	0

					Kelompok Tani Ternak Lembu Makmur Ds. Menduran Kec. Brati				133.250.000	133.250.000	0
					Kelompok Tani Ternak Lembu Makmur Ds. Putatsari Kec. Grobogan				119.925.000	119.925.000	0
					Kelompok Tani Ternak Lembu Makmur Ds. Teguhan Kec. Grobogan				119.925.000	119.925.000	0
					Kelompok Tani Ternak Lembu Perkasa Ds. Rejosari Kec. Grobogan				119.925.000	119.925.000	0
					Kelompok Tani Ternak Lembu Serang Ds. Sedadi Kec. Penawangan				119.925.000	119.925.000	0
					Kelompok Tani Ternak Lemu Subur Ds. Lebak Kec. Grobogan				119.925.000	119.925.000	0
					Kelompok Tani Ternak Rahayu Ds. Gedangan Kec. Wirosari				133.250.000	133.250.000	0
					Kelompok Tani Ternak Sumber Jaya Ds. Jambon Kec. Pulokulon				93.275.000	93.275.000	0
					Pengadaan Kambing Jawarandu Perubahan (8 KTT)				0	287.768.000	287.768.000
					Bantuan Kambing Jawarandu kepada KTT Bolo Angon Desa Termas Kecamatan Karangrayung				0	37.009.000	37.009.000
					Bantuan Kambing Jawarandu kepada KTT Kuncen Jaya Farm Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan				0	34.241.000	34.241.000
					Bantuan Kambing Jawarandu kepada KTT Ledok Jaya Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari				0	48.081.000	48.081.000
					Bantuan Kambing Jawarandu kepada KTT Lumintu Desa Karangsari Kecamatan Brati				0	37.009.000	37.009.000

				Bantuan Kambing Jawarandu kepada KTT Mulya Jaya Desa Suru Kecamatan Geyer				0	37.009.000	37.009.000
				Bantuan Kambing Jawarandu kepada KTT Sido Makmur Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo				0	37.009.000	37.009.000
				Bantuan Kambing Jawarandu kepada KTT Wiratani Desa Dokoro Kecamatan Wirosari				0	57.410.000	57.410.000
				Pengadaan Domba				0	29.915.000	29.915.000
				Bantuan Domba kepada KTT Konco Tani Desa Karangwader Kecamatan Penawangan				0	29.915.000	29.915.000
				Pengadaan Sapi Peranakan/Persilangan Limousine (untuk 5 KTT) Perubahan				0	586.300.000	586.300.000
				Bantuan Sapi Peranakan Limousine / Persilangannya kepada KTT Anoman Desa Teguhan Kecamatan Grob				0	119.925.000	119.925.000
				Bantuan Sapi Peranakan Limousine / Persilangannya kepada KTT Berkah Tani Desa Sobo Kecamatan Geyer				0	93.275.000	93.275.000
				Bantuan Sapi Peranakan Limousine / Persilangannya kepada KTT Duta Karya Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan				0	53.300.000	53.300.000
				Bantuan Sapi Peranakan Limousine / Persilangannya kepada KTT Kandang Lestari Desa Tirem Kec. Brati				0	119.925.000	119.925.000

					Bantuan Sapi Peranakan Limousine / Persilangannya kepada KTT Sejahtera Lembu Desa Kronggen Kecama Brati					53.300.000	53.300.000
					Bantuan Sapi Peranakan Limousine / Persilangannya kepada KTT Utomo Makmur 1 Desa Bangsri Kecamatan Geyer				0	146.575.000	146.575.000
					Pengadaan Kambing PE Perubahan				0	110.200.000	110.200.000
					Bantuan Kambing Peranakan Etawa kepada KTT Berkah Amanah Desa Godan Kecamatan Tawangharjo				0	23.065.000	23.065.000
					Bantuan Kambing Peranakan Etawa kepada KTT Berkah Karya Desa Jono Kecamatan Tawangharjo				0	41.005.000	41.005.000
					Bantuan Kambing Peranakan Etawa kepada KTT Dokoro Makmur Desa Dokoro Kecamatan Wirosari				0	23.065.000	23.065.000
					Bantuan Kambing Peranakan Etawa kepada KTT Tri Jaya Makmur Desa Tegalrejo Kecamatan Wirosari				0	23.065.000	23.065.000
					Pengadaan Aym KUB (Perubahan)				0	56.895.000	56.895.000
					Bantuan ayam KUB kepada KTT Lumintu Desa Ngambakrejo Kec. Tanggunharjo				0	47.545.000	47.545.000
					Bantuan ayam KUB kepada KTT Lumintu Desa Ngambakrejo Kec. Tanggunharjo				0	9.350.000	9.350.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	-	100 %	2.936.500.000	1.423.490.000	-1.513.010.000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian terbangun	-	7 Unit	2.936.500.000	1.423.490.000	-1.513.010.000

3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	3 Unit	0	492.340.000	492.340.000
					Rab Gambar dan Konsultan Pengawas				0	7.725.000	
					Pembangunan Jalan Produksi Peternakan Kelompok Tani Ternak Tani Mulyo Desa Sugihan Kec. Toroh				0	142.370.000	
					Pembangunan Jalan Produksi Peternakan KTT. Mitra Manunggal Makmur Desa Papanrejo Kec. Gubug				0	147.260.000	
					Pembangunan Jalan Produksi Peternakan KTT. Sumber Ternak Mandiri Desa Genuksuran Kec. Purwodadi				0	194.985.000	
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	8 Unit	2.936.500.000	931.150.000	-2.005.350.000
					Pengadaan Instalasi Biogas				143.500.000	143.500.000	0
					Rehab Gedung Puskesmas (9 Unit) - DAK Fisik 2025				1.060.000.000	0	-1.060.000.000
					Sapras Puskesmas (9 Unit) - DAK Fisik 2025				1.000.000.000	0	-1.000.000.000
					Jalpro - DAK Fisik 2025				600.000.000	0	-600.000.000
					Kegiatan Penunjang DAK Fisik 2025				133.000.000	0	-133.000.000
					Rab Gambar dan Konsultan Pengawas				0	9.725.000	9.725.000
					Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan Kelompok Tani Ternak Amongroso Desa Geyer Kec. Geyer				0	125.500.000	125.500.000
					Pembangunan Kandang KTT. Lembu Karang Ploso Desa Sedadi Kecamatan Penawangan				0	142.425.000	142.425.000
					Pengadaan USG Hewan				0	160.000.000	160.000.000

					Rehab Gedung Puskesmas (2 Unit)				0	350.000.000	350.000.000
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	0	0	0
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH Persentase angka kesembuhan hewan	76 57,5 % %	57,5 76 % %	2.049.613.000	2.647.896.000	598.283.000
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kejadian penyakit menular dan zoonosis yang terkendali	83 %	83 %	199.997.000	810.899.000	610.902.000
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	199.997.000	810.899.000	610.902.000
					Pengadaan Obat Hewan				122.578.000	122.578.000	0
					Pengadaan bahan medis habis pakai				62.619.000	62.619.000	0
					Pengadaan pakaian lapangan petugas kesehatan hewan				7.300.000	7.300.000	0
					Pengadaan leafled				7.500.000	7.500.000	0
					Penanganan PMK				0	610.902.000	610.902.000
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hewan keluar/masuk kabupaten yang terawasi	39 %	39 %	0	0	0
3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	12 Laporan	12 Laporan	0	0	0

3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi pelayanan jasa medik veteriner	19.3 %	19.3 %	1.749.600.000	1.749.600.000	0
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	1.749.600.000	1.749.600.000	0
					Pengadaan Obat Hewan				450.000.000	450.000.000	0
					Pengadaan Bahan Pendukung Pengobatan				76.500.000	76.500.000	0
					Operasional Pelaporan Isikhnas				21.600.000	21.600.000	0
					Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan				918.000.000	918.000.000	0
					Operasional Pelayanan PHMS				0	0	0
					Pelaksanaan Koordinasi Petugas Medik dan Paramedik Veteriner				45.900.000	45.900.000	0
					Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan				30.600.000	30.600.000	0
					Pengambilan, pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium				27.000.000	27.000.000	0
					Bimbingan teknis penanganan gangguan reproduksi				180.000.000	180.000.000	0
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	54 %	54 %	100.016.000	87.397.000	-12.619.000
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	17.016.000	17.016.000	0
					Pelaksanaan operasi yustisi produk asal hewan				17.016.000	17.016.000	0
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	12 Unit Usaha	38 Unit Usaha	83.000.000	70.381.000	-12.619.000

					Pelaksanaan Promosi Makanan asal hewan yang ASUH				83.000.000	70.381.000	-12.619.000
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	100 %	100 %	0	0	0
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase unit usaha produksi peternakan terawasi	30 %	30 %	0	0	0
3	27	06	2.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	12 Laporan	12 Laporan	0	0	0
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani ternak terbina	75 %	75 %	156.010.000	1.039.488.000	883.478.000
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak terbina	70 %	70 %	156.010.000	1.039.488.000	883.478.000
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Unit	325 Unit	156.010.000	207.938.000	51.928.000
					Pelaksanaan Sekolah Peternakan				104.634.000	97.938.000	-6.696.000
					Penyediaan jasa dekorasi dan sarana pendukung keikutsertaan Ekspo				51.376.000	31.376.000	-20.000.000
					Kontes Kambing PE				0	78.624.000	78.624.000
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Unit	8 Unit	0	831.550.000	831.550.000
					Pengadaan Sapi PO - DBHCHT (3 KTT)				0	304.425.000	304.425.000
					Pengadaan Kambing Jawarandu dan HPT - DBHCHT (1 KTT)				0	70.832.000	70.832.000

					Pelatihan Pengolahan Pakan - DBHCHT				0	23.943.000	23.943.000
					Pengadaan Mesin APPO, Mesin Jahit Karung, dan Karung Plastik				0	102.300.000	102.300.000
					Pengadaan Sapi Peranakan / Persilangan Simmental Jantan (3 KTT)				0	330.050.000	330.050.000
					Pengadaan Sapi Simmental Jantan / Persilangannya Kelompok Tani Ternak Baqor Sapi Tuko Farm Desa Tuko Kec. Pulokulon				0	129.150.000	129.150.000
					Pengadaan Sapi Simmental Jantan / Persilangannya Kelompok Tani Ternak Gabus Jaya Farm Desa Bendoharjo Kec. Gabus				0	71.750.000	71.750.000
					Pengadaan Sapi Simmental Jantan / Persilangannya Kelompok Tani Ternak Sejahtera Farm Kel. Purwodadi				0	129.150.000	129.150.000
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	5 Unit	0	0	0
<b>J U M L A H</b>									<b>22.900.211.000</b>	<b>23.655.939.800</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan bidang peternakan dan perikanan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi termuat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.

Untuk memastikan Perubahan Renja Disnakkab tahun 2025 dapat berjalan dengan baik, perlu dirumuskan Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pada implementasinya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan berkewajiban untuk berusaha pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026
2. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan akan benar-benar menggunakan dan/atau memperhatikan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagai dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan tahun 2025 terutama dalam pencapaian kinerja kegiatan;
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 akan menjadi/merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan akan benar-benar memperhatikan proses pelaksanaannya (berbasis pada proses), sehingga target dari indikator kinerja akan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025, selanjutnya akan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 setelah diselaraskan dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
6. Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan

Triwulan I tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 2025;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan pembangunan pada urusan Kelautan Dan Perikanan dan Pertanian yang direncanakan melalui dokumen Perubahan Renja Disnakan tahun 2025 akan memperhatikan proses penyusunan pada tingkat perencanaan dan pelaksanaannya. Sehingga perencanaan dan pelaksanaan yang memperhatikan proses dengan baik diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik, terutama pada capaian *output* dan *outcome*.

Semoga dengan tersusun dan terlaksananya Perubahan Renja Disnakan tahun 2025 mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 maupun RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026. Sebagai tindak lanjut, Perubahan Renja Disnakan ini agar dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) Perubahan dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

Purwodadi, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan  
Kabupaten Grobogan



Amin Nur Hatta, S.Sos.  
Pembina Utama Muda

NIP. 19691223 199003 1 001